

**DIPLOMASI TUVALU DALAM MENANGANI ANCAMAN KENAIKAN
PERMUKAAN LAUT SEBAGAI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN
2020-2024**

(Skripsi)

Oleh
ROBA'I JORDAN ABADI
NPM 2116071036



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DIPLOMASI TUVALU DALAM MENANGANI ANCAMAN KENAIKAN PERMUKAAN LAUT SEBAGAI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2020-2024

Oleh

ROBA'I JORDAN ABADI

Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim menjadi ancaman eksistensial bagi negara-negara kepulauan kecil seperti Tuvalu. Meskipun menyumbang emisi karbon dalam jumlah yang sangat kecil, Tuvalu menghadapi risiko kehilangan wilayah, kedaulatan, serta identitas nasionalnya. Kerentanan geografis dan keterbatasan sumber daya mendorong Tuvalu untuk melakukan diplomasi aktif demi mempertahankan eksistensinya di tengah krisis iklim global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen, laporan lembaga internasional, dan pernyataan resmi pemerintah Tuvalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuvalu memanfaatkan diplomasi bilateral dan multilateral melalui forum seperti COP dan UNGA untuk menyerukan keadilan iklim, menuntut tanggung jawab negara besar penghasil emisi, serta memperjuangkan bantuan dan perlindungan hukum bagi eksistensi negaranya.

Tuvalu berhasil membangun narasi diplomatik yang kuat dengan menekankan prinsip *climate justice* dan memanfaatkan aliansi seperti AOSIS. Diplomasi ini bukan hanya bentuk advokasi lingkungan, tetapi juga upaya mempertahankan kedaulatan negara di tengah ancaman nyata perubahan iklim global.

Kata Kunci: Diplomasi iklim, kenaikan permukaan laut, perubahan iklim, Tuvalu.

ABSTRACT

TUVALU'S CLIMATE DIPLOMACY IN ADDRESSING THE THREAT OF SEA-LEVEL RISE DUE TO CLIMATE CHANGE (2020-2024)

By

ROBA'I JORDAN ABADI

Sea-level rise caused by climate change poses an existential threat to small island nations like Tuvalu. Despite contributing minimally to global carbon emissions, Tuvalu faces the risk of losing its territory, sovereignty, and national identity. Its geographic vulnerability and limited resources have compelled Tuvalu to engage in proactive diplomacy to ensure its survival amid the global climate crisis. This study employs a descriptive qualitative approach using secondary data collection techniques through document analysis, international organization reports, and official government statements. The findings reveal that Tuvalu has utilized both bilateral and multilateral diplomacy in forums such as the COP and UNGA to advocate for climate justice, demand accountability from major emitting countries, and seek financial support and legal protection for its continued existence. Tuvalu has effectively constructed a strong diplomatic narrative grounded in the principles of climate justice, leveraging alliances like AOSIS. Its climate diplomacy serves as an environmental advocacy tool and a strategic effort to preserve national sovereignty in the face of intensifying climate threats.

Keywords: Climate change, climate diplomacy, sea-level rise, Tuvalu.

**DIPLOMASI TUVALU DALAM MENANGANI ANCAMAN KENAIKAN
PERMUKAAN LAUT SEBAGAI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN
2020-2024**

Oleh

ROBA'I JORDAN ABADI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **DIPLOMASI TUALU DALAM
MENANGANI ANCAMAN KENAIKAN
PERMUKAAN LAUT SEBAGAI DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2020-2024**

Nama Mahasiswa : **Roba'i Jordan Abadi**

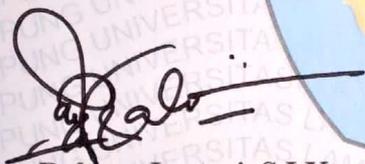
Nomor Pokok Mahasiswa : **2116071036**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

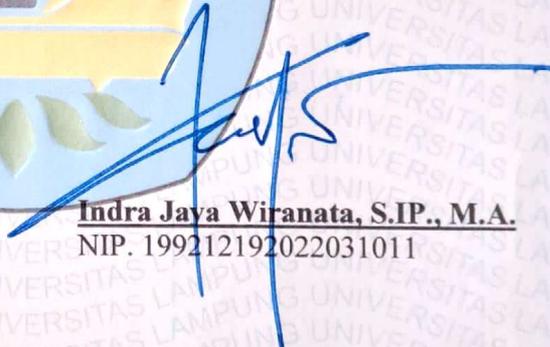
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

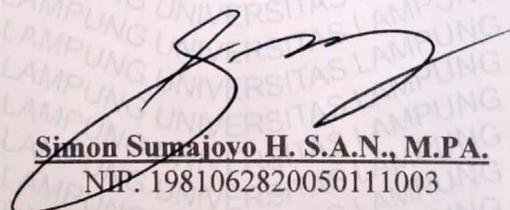


Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.
NIP. 198902152022032005



Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 199212192022031011

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

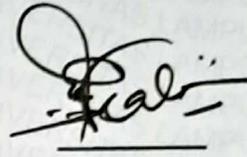


Simon Suprajoyo H. S.A.N., M.PA.
NIP. 1981062820050111003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

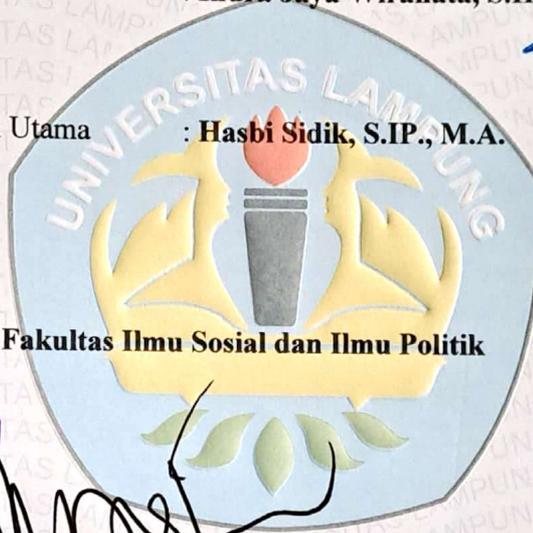
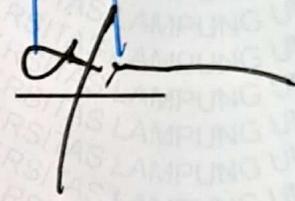
Ketua : **Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.**



Sekretaris : **Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.**



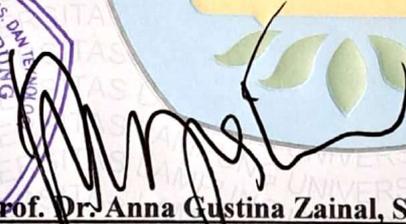
Penguji Utama : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 April 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 April 2025

membuat pernyataan,



Roba'i Jordan Abadi

2116071036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Roba'i Jordan Abadi, lahir di Lampung Tengah, 2 Februari 2003 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suki dan Ibu Jubaidah. Peneliti memulai Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Miftahul Ulum Terbanggi Mulya tahun 2007-2008, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Terbanggi Mulya tahun 2008-2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Bandar Mataram tahun 2014-2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kotagajah 2017-2020. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa di jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional sebagai anggota *Sport, Art, and Recreation* di periode 2023-2024 dan sebagai kepala divisi *Sport, Art, and Recreation* di periode 2024-2025. Penulis juga aktif mengikuti kepanitiaan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional selama dua periode menjabat, salah satunya yaitu di Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia ke-36 sebagai kepala divisi Media Partner. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan magang mandiri di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan penempatan posisi Departemen Mitra Bisnis Pemasaran di bagian Administrasi Penjualan Urea dan Amonia Non-Subsidi, serta di bagian *Joint Cost* dan Pelaporan. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan tahun 2024.

MOTTO

“You Only live once, but if you do it right, once is enough.”

(Mae West)

“Everything’s gonna be Okay”

(Bondan Prakoso)

“Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui”

(JKT 48)

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Diplomasi Tuvalu Dalam Menangani Ancaman Kenaikan Permukaan Laut Sebagai Dampak Perubahan Iklim Tahun 2020-2024”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sekaligus menyelesaikan studi di Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis juga tidak melupakan bahwa berhasilnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa, dan semangat berbagai pihak kepada penulis dalam menghadapi tantangan selama penelitian berlangsung, sehingga pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala berkah dan rahmat-Nya dalam memberikan kemudahan baik selama penyusunan hingga menyelesaikan skripsi, serta kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menuntun dari zaman kegelapan menuju jalan kemenangan.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Prof. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
5. Ibu Rahayu Lestari, S.I.kom., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi, yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat serta motivasi kepada penulis selama masa di perkuliahan, dan penyusunan skripsi hingga selesai. Terima kasih banyak atas segala dedikasinya selama ini.

6. Bapak Indra Jaya Wiranata, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang sudah memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat serta motivasi kepada penulis agar lebih semangat lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi saya.
7. Bapak Hasbi Sidik, S.I.P., M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu, waktu, saran serta masukan kepada penulis. Terima kasih banyak sudah banyak memberikan ilmu baru yang membangun tentang penelitian yang penulis lakukan.
8. Madam Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dan membantu penulis dalam menjalankan perkuliahan di Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional, terima kasih atas ilmu, bantuan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis, serta tidak lupa selalu mengajarkan semboyan HI yaitu, 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) + 1J (Jujur). Semoga kelak ilmu yang diperoleh oleh penulis, dapat menjadi bekal berharga kedepannya.
10. Dan juga staf Jurusan Hubungan Internasional serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
11. Kepada kedua orang tua penulis, bapak Suki dan Ibu Jubaidah terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah mendidik saya dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Selalu membekali dan mengajarkan berbagai ilmu dalam berkehidupan agar menjadi individu yang baik. Terima kasih atas segala dukungannya dan telah mengantarkan saya sampai pada titik ini. Tak lupa, terima kasih atas segala doa dan harapan yang tanpa henti kalian berikan di setiap langkah yang penulis lakukan.
12. Kepada kakak dan adik penulis, Trio Cahyo dan Desi Aza Lia Azura terima kasih atas segala dukungan dan pengorbanan yang kalian lakukan demi

berjalannya perkuliahan penulis hingga selesai. Terima kasih atas segala doa dan semangat yang kalian lakukan untuk penulis.

13. Seluruh anggota keluargaku tercinta, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.
14. Kepada sahabat penulis Lysandra Areta Salsabila, Ilham Ardiansyah, Farah Salsabila, dan Ferena Sutejo terima kasih atas segala tangis, canda tawa yang telah kita lalui bersama sejak masa SMA hingga saat ini. Terima kasih sudah selalu menemani penulis dari awal hingga akhir. Terima kasih telah menerima penulis terlepas dari segala kekurangan dan pribadi yang penulis miliki. Mari terus berbahagia hingga kita sukses di jalan masing-masing.
15. Kepada sahabat penulis, Daffa Al-Ghiffari, terima kasih selalu ada dan dengan tulus menemani penulis dari awal menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam berproses mencapai gelar sarjana ini. Semoga pertemanan ini tetap terjalin di masa depan meski nantinya kita berjalan di pilihan masing-masing. Mari bertemu kembali dengan versi terbaik dari diri kita di masa mendatang.
16. Kepada Riza Faris, selaku sahabat dan rekan magang penulis di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Terima kasih atas segala proses dan pengalaman yang kita lewati hingga saat ini. Terima kasih telah menemani penulis hingga saat ini.
17. Kepada sahabat-sahabat penulis di perkuliahan yaitu Rizky Sukma, Muhamad Akbar, M. Sczasimbi, Eleanor Clara, Farhan Alfajri, Rafly Ardida, Anisa Salma, Theresia Avila, Ramadhita Azzahra, Lischa Yulianti, Nazhara Saroja, Siti Aqeela, dan Heti Bairani terima kasih sudah menemani serta mendukung penulis selama empat tahun ini dalam suka dan duka hingga mencapai gelar sarjana. Saya sangat bersyukur memiliki sahabat-sahabat yang selalu ada menemani di setiap langkah perjalanan ini. Dukungan, kebersamaan, dan ketulusan kalian telah menjadikan setiap tantangan lebih mudah dan setiap momen lebih berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

18. Adik-adik penulis dari HMJ-HI yang selalu menemani selama dua periode, Mutiara Intani, Husnia Wulan, dan Ghora Dipo terima kasih atas segala momen dan kebersama yang sudah kita lewati bersama.
19. Teman-teman penulis dari HMJ-HI periode 23/24 dan periode 22/23 terima kasih atas segala kesibukan yang membuat masa perkuliahan penulis menjadi jauh lebih produktif. Terima kasih atas segala dukungan dan pengalamannya.
20. Kepada teman-teman KKN Desa Negeri Baru, terima kasih telah menjadi keluarga selama 40 hari. Terima kasih atas pengalaman hidup yang begitu berkesan bagi penulis.
21. Seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung angkatan 2021, terima kasih telah menjadi cerita dalam perjalanan panjang penulis selama 4 (empat) tahun masa perkuliahan ini.
22. Tak lupa, Roba'i Jordan Abadi, terima kasih atas segala perjuangan yang telah dihadapi hingga tetap bertahan hingga saat ini. Meskipun terdapat banyak sekali gejolak selama 4 tahun ini, terima kasih untuk tetap percaya pada diri sendiri dalam menghadapi hal itu semua. Terima kasih telah membuktikan bahwa kamu bisa menghadapi segala rintangan yang ada. Teruslah melangkah maju, hadapi segalanya dengan kuat, dan capailah semua impian yang sudah kamu rencanakan.

Bandar Lampung, 21 April 2025
Penulis,

Roba'i Jordan Abadi
NPM. 2116071036

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR SINGKATAN | v |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang dan Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2.2 Landasan Konseptual | 15 |
| 2.2.1 Climate Diplomacy | 15 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 22 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | 23 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 23 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 23 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 24 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 25 |
| | |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | 27 |
| 4.1 Kenaikan Permukaan Laut sebagai Dampak Perubahan Iklim | 27 |
| 4.1.1 Kenaikan Permukaan Laut bagi Negara-Negara Kepulauan Kecil. | 27 |
| 4.1.2 Dampak Spesifik terhadap Tuvalu | 29 |
| 4.2 Diplomasi Tuvalu dalam Menangani Ancaman Kenaikan Permukaan Laut (2020-2024) | 31 |
| 4.2.1 Diplomasi Iklim Tuvalu Tahun 2020-2024 | 32 |
| | |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN | 66 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 66 |
| 5.2 Saran..... | 67 |

DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. 1.Data Demografi dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Marshall, Kiribati, dan Tuvalu yang diperoleh dari World Bank Data..... | 4 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1. 1 Sepuluh negara tertinggi penyumbang Emisi karbon (CO2) dan Tuvalu pada tahun 2010 hingga 2021 | 2 |
| Gambar 1. 2 Grafik peningkatan permukaan air laut global sejak 1993 hingga 2024 | 3 |
| Gambar 1. 3 Kenaikan level air laut dari tahun 1993 hingga 2022 oleh data altimetry satelit. | 5 |
| Gambar 1. 4 Perbedaan permukaan laut yang lebih tinggi dari biasanya di sekitar dua pulau berpenghuni di Tuvalu | 6 |
| Gambar 4. 1 Fongfale Island, Ibu kota Funafuti, Tuvalu..... | 28 |
| Gambar 4. 2 Wanita Tuvalu mengendarai motor menerjang Banjir..... | 30 |
| Gambar 4. 3 Perdana Menteri Tuvalu, Kausea Natano menyampaikan Pernyataan Nasional pada UNGA ke-75 | 32 |
| Gambar 4. 4 Prime Minister of Tuvalu, H.E. Kausea Natano at the 76th UNGA | 36 |
| Gambar 4. 5 Menteri Luar Negeri Tuvalu, H.E. Simon Kofe berpidato di perairan laut pada COP26..... | 48 |
| Gambar 4. 6 Perdana Menteri Tuvalu, Kausea Natano pada COP26, Glasgow, Scotland | 49 |
| Gambar 4. 7 Prime Minister of Tuvalu, H.E. Kausea Natano at the 77th UNGA | 38 |
| Gambar 4. 8 Pidato PM Tuvalu Kausea Natano di COP27 climate summit Egypt | 53 |
| Gambar 4. 9 Pidato Menteri Luar Negeri Tuvalu Simon Kofe pada COP27..... | 55 |
| Gambar 4. 10 Prime Minister of Tuvalu, H.E. Kausea Natano at the 78th UNGA | 40 |
| Gambar 4. 11 Prime Minister of Tuvalu, H.E. Feleti Teo at the 79th UNGA | 44 |
| Gambar 4. 12 Feleti Penitala Teo, Perdana Menteri Tuvalu berbicara di COP29 Baku, Azerbaijan | 59 |
| Gambar 4. 13 Penandatanganan Australia-Tuvalu Falepili Union oleh PM Anthony Albanese dan PM Kausea Natano..... | 62 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|--|
| AOSIS | : <i>Alliance of Small Island States</i> |
| COP | : <i>Conference of the Parties</i> |
| COSIS | : <i>Comission of Small Island States</i> |
| Hon. | : <i>Honorable/Honorary</i> |
| H.E. | : <i>His/Her Excellency</i> |
| ICJ | : <i>International Court of Justice</i> |
| IPCC | : <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> |
| ITLOS | : <i>International Tribunal of the Law of the Sea</i> |
| LDCs | : <i>Least Developed Countries</i> |
| NDCs | : <i>Nationally Determined Contributions</i> |
| PBB | : <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i> |
| PIF | : <i>Pacific Islands Forum</i> |
| PM | : <i>Prime Minister / Perdana Menteri</i> |
| SIDS | : <i>Small Island Developing States</i> |
| UNCLOS | : <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> |
| UNFCCC | : <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> |
| UNGA | : <i>United Nations General Assembly</i> |
| ZEE | : <i>Zona Ekonomi Eksklusif</i> |

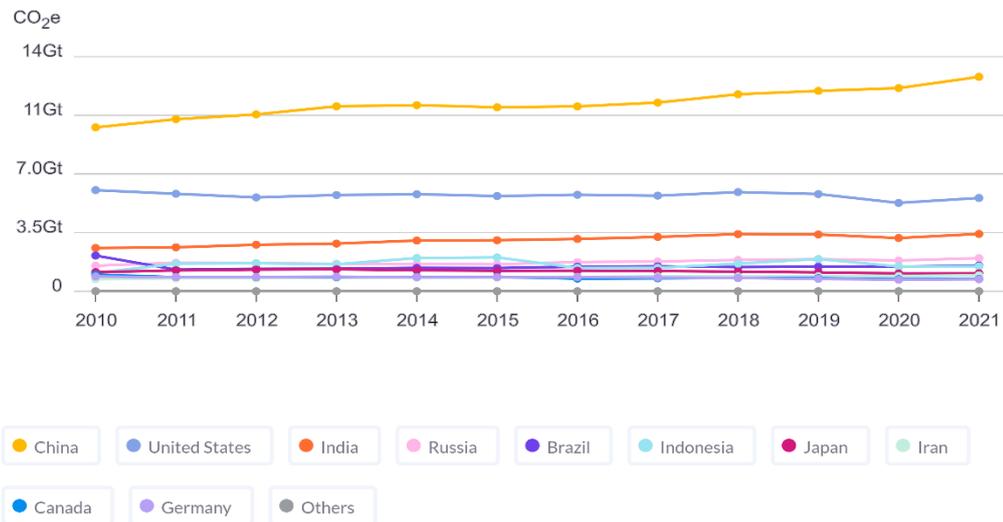
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Perubahan iklim global telah menjadi isu penting pada politik internasional. Isu perubahan iklim tidak lagi dikesampingkan dalam membentuk kebijakan luar negeri, tetapi sudah menjadi fokus utama termasuk dalam menjalin hubungan kerjasama antar negara (Sending dkk., 2020). Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) yang diadopsi oleh 196 negara di Paris pada tahun 2015. Dalam Perjanjian Paris, negara-negara sepakat untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan mengupayakan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Kesepakatan yang dihasilkan dalam konferensi ini menunjukkan tujuan yang ambisius dengan didukung oleh hampir seluruh negara di dunia. Namun, Perjanjian Paris ini bersifat sukarela yang mana komitmen-komitmen yang tercantum di dalamnya tidak mengikat negara-negara secara hukum. Hal ini berdampak pada keberhasilan aksi iklim global yang sangat bergantung pada kemauan politik masing-masing negara karena tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan mereka untuk mengurangi emisi (Elliott & Cook, 2016).

Perubahan iklim adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang dihadapi hingga saat ini. Negara-negara besar dan perusahaan-perusahaan multinasional bahan bakar fosil yang berkontribusi atas terjadinya perubahan iklim mendapatkan keuntungan besar dengan mengeksploitasi sumber daya. Disisi lain, hal tersebut memberikan ancaman serius bagi milyaran manusia yang hidup dalam kondisi rentan di seluruh dunia. Meskipun begitu, mereka yang bertanggung jawab atas masalah ini menunjukkan minat yang rendah untuk memperbaiki kerusakan atau

mengambil tindakan serius untuk mengurangi emisi. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa mereka yang paling sedikit menyebabkan terjadinya perubahan iklim justru menjadi pihak yang menghadapi dampak terburuk atas perubahan iklim (Boom dkk., 2016).



Gambar 1. 1 Sepuluh negara tertinggi penyumbang Emisi karbon (CO₂) dan Tuvalu pada tahun 2010 hingga 2021

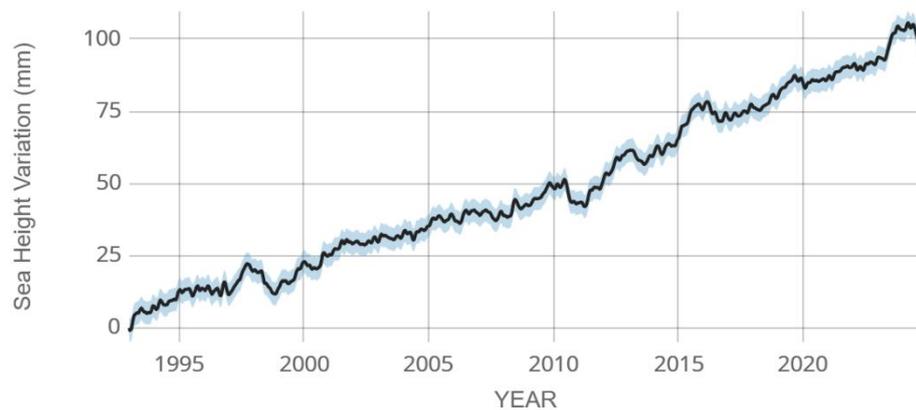
Sumber: Diperoleh dari CLIMATEWATCH (2021)

Aspek paling mendasar dari perubahan iklim adalah peningkatan emisi efek rumah kaca (*greenhouse effect*) yang disebabkan oleh pemanasan global. Efek rumah kaca dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang merusak lapisan ozon di atmosfer bumi dan menyebabkan adanya peningkatan suhu secara global. Pemanasan global yang terjadi karena peningkatan pada suhu rata-rata bumi memicu perubahan pola cuaca secara tidak wajar, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut (Ikbar, 2014). Menurut laporan dari *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*¹, lebih dari 90% energi yang mengakibatkan pemanasan global sejak 50 tahun terakhir menyebabkan adanya peningkatan suhu dan volume air laut serta pencairan lapisan es di Greenland dan Antartika, yang mana keduanya berkontribusi pada naiknya permukaan air laut.

¹ Dibentuk pada tahun 1988, tujuan IPCC adalah untuk menyediakan informasi ilmiah kepada pemerintah di semua tingkat yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan iklim. Laporan IPCC juga merupakan masukan utama dalam negosiasi perubahan iklim internasional (IPCC, 2024).

Kondisi ini semakin mengancam negara-negara kepulauan kecil yang beresiko kehilangan sebagian besar wilayahnya akibat erosi pantai dan banjir yang diakibatkan oleh kenaikan permukaan air laut (IPCC, 2018).

Fenomena kenaikan permukaan laut merupakan ancaman terbesar bagi negara-negara kecil kepulauan. Data dari Nasa Sea Level Change menunjukkan bahwa kenaikan permukaan air laut global rata-rata mencapai 100.9 mm sejak 1993 dan naik setinggi 14 mm dari 2020 hingga 2024 yang disebabkan oleh mencairnya lapisan es di daratan dan gletser, serta pemuaiannya air laut ketika sedang hangat (Gambar 1.1). Diperkirakan bahwa hingga akhir abad ini, permukaan laut bisa naik antara 0,3 hingga 1 meter jika emisi gas rumah kaca tidak dikendalikan secara signifikan (IPCC, 2022).



Gambar 1. 2 Grafik peningkatan permukaan air laut global sejak 1993 hingga 2024

Sumber: Diperoleh dari Sea Level Change Observations from Space

Wilayah Pasifik diisi dengan negara-negara kepulauan kecil yang cukup rentan terhadap kenaikan permukaan laut karena dapat berdampak secara langsung bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Selain itu, wilayah Pasifik juga sering dilanda fenomena curah hujan yang tidak menentu, suhu laut yang meningkat, perubahan pola angin juga memperburuk kondisi ekosistem laut, dan badai tropis yang semakin intens akibat pemanasan global (Kumar dkk., 2020). Kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada perikanan juga terancam dengan adanya kerusakan pada terumbu karang akibat pemanasan global (Tol &

Dvarskas, 2018). Terdapat tiga negara atoll di Kawasan Oseania yang rentan akan kenaikan permukaan laut antara lain, Republik Kiribati, Republik Kepulauan Marshall, dan Tuvalu (Nakayama dkk., 2022). Ketiga negara ini menghadapi ancaman yang sama dengan perkiraan pada tahun 2050 harus terpaksa melakukan migrasi ke wilayah lain karena naiknya permukaan laut. Hal ini disebabkan oleh hampir seluruh penduduk tinggal dengan jarak 500 m dari garis pantai dengan persentase masing-masing Kiribati 98%, Kepulauan Marshall 98%, dan Tuvalu 99% (Kumar dkk., 2020).

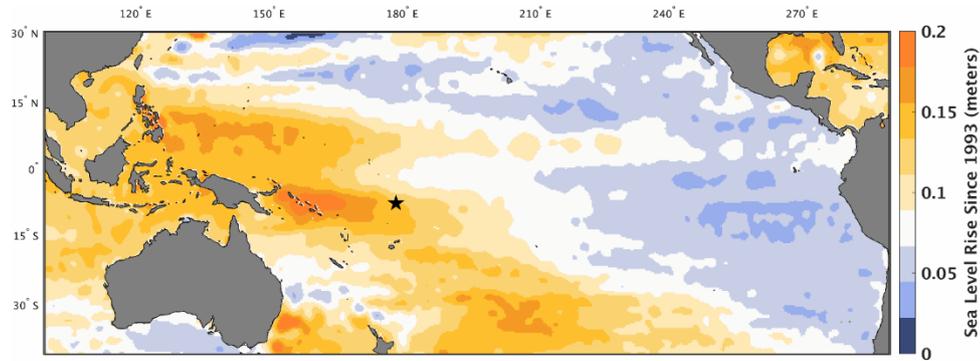
Tabel 1. 1. Data Demografi dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Marshall, Kiribati, dan Tuvalu yang diperoleh dari World Bank Data

| No | Negara | Total Populasi (Jiwa) | Luas Wilayah (km ²) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²) | Hasil Perikanan (ton) | Lahan Pertanian (km ²) | Luas Daratan Dibawah 5 meter (%) |
|----|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Kepulauan Marshall | 42050 | 180 km ² | 233 | 95819 | 70 km ² | 81,7 % |
| 2 | Kiribati | 128874 | 810 km ² | 159 | 191129 | 340 km ² | 67,5 % |
| 3 | Tuvalu | 11204 | 26 km ² | 431 | 31087 | 18 km ² | 68 % |

Sumber: Dirangkum oleh peneliti melalui The World Bank.

Fenomena kenaikan permukaan laut di Tuvalu berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini karena adanya perbedaan pada fluktuasi lautan di berbagai belahan dunia dari waktu ke waktu (NASA Sea Level Change Team, 2023). Laporan dari The World Bank Group, menunjukkan pola curah hujan dari Tuvalu, Kiribati, dan Kepulauan Marshall cenderung memiliki perbedaan yang cukup besar. Curah hujan di Kiribati mencapai puncaknya antara bulan Maret dan Mei, mencapai hingga 180 mm. Dengan curah hujan tahunan sebesar 2.500 hingga 3.000 mm, Tuvalu mengalami fluktuasi besar antara musim hujan dan kemarau, dengan curah hujan tahunan meningkat dua kali lipat selama musim hujan. Di sisi lain, Kepulauan Marshall berlangsung dari Mei hingga November, dengan puncak curah hujan lebih dari 300 mm per bulan dari Agustus hingga Oktober (The World Bank Group, 2024). Dari fenomena naiknya permukaan laut ini menyebabkan kerugian secara

ekonomi pada Tuvalu dengan perkiraan kerugian pada tahun 2023 sebesar 7%, sedangkan pada Kiribati dan Kepulauan Marshall sebesar 3-4% (The World Bank Group, 2024).

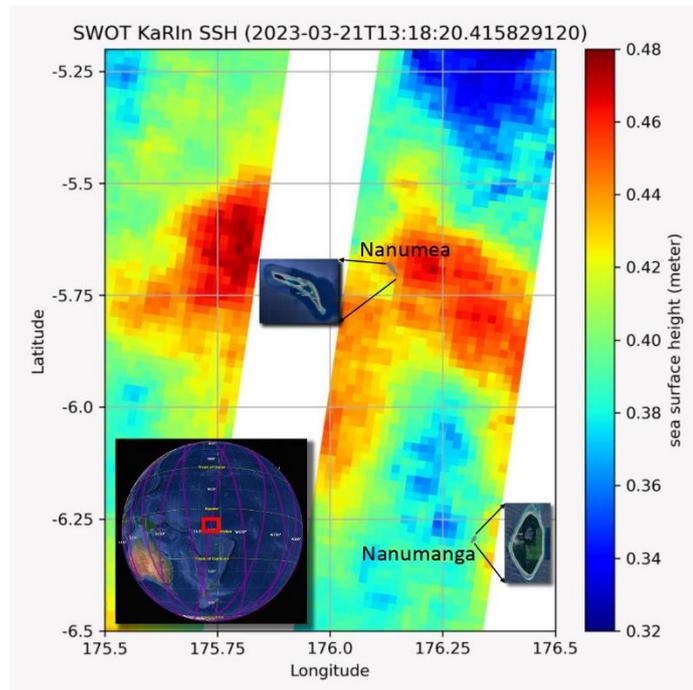


Gambar 1. 3 Kenaikan level air laut dari tahun 1993 hingga 2022 oleh data altimetry satelit.

Sumber: Diperoleh dari NASA Sea Level Change Team (2023)

Tuvalu merupakan negara kepulauan atoll kecil yang berada di Oseania dengan populasi sekitar 11.000 orang. Tuvalu terdiri dari 9 pulau yang secara keseluruhan memiliki luas 26 km² dengan mayoritas penduduk tinggal di pulau Funafuti (The World Bank Group, 2021). Sebagian besar daratan di Tuvalu memiliki permukaan yang rendah, oleh sebab itu naiknya permukaan laut akan berdampak pada sebagian besar lahan dan infrastruktur penting (McMichael dkk., 2021). Data terbaru dari NASA Sea Level Change Team menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut di Tuvalu mencapai 5,1 mm per tahun, hampir dua kali lipat dari rata-rata global. Selama 30 tahun terakhir, permukaan air laut Tuvalu telah meningkat 0,15 m sejak tahun 1993 (NASA Sea Level Change Team, 2023). Dampak yang paling terlihat dari berlanjutnya tren perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut bagi Tuvalu yaitu timbulnya banjir yang terus datang dari laut, hilangnya lahan bagi pertanian, dan terganggunya ketahanan pangan akibat intrusi air asin ke dalam sumber air tawar (Salem, 2020). Terumbu karang, yang sangat penting bagi sektor perikanan, juga mengalami degradasi akibat peningkatan suhu laut dan keasaman air laut (Kumar dkk., 2020). Selain itu, dampak terburuk dari terus berlanjutnya kenaikan level permukaan air laut akan mengarah pada hilangnya

budaya dan eksistensi Tuvalu secara keseluruhan sebagai negara yang berdaulat (Tol & Dvarksas, 2018).



Gambar 1. 4 Perbedaan permukaan laut yang lebih tinggi dari biasanya di sekitar dua pulau berpenghuni di Tuvalu

Sumber: Diperoleh dari NASA Jet Propulsion Laboratory (2023)

Tuvalu merupakan negara dengan urutan ke-191 dari 194 negara penghasil emisi karbon dengan kontribusi sebesar 0.02% pada emisi global tahun 2021, sedangkan China, USA, dan India sebagai tiga negara penghasil emisi karbon terbesar hampir memberikan kontribusi sebesar 45% pada emisi global (CLIMATEWATCH, 2021). Meskipun demikian, Tuvalu justru menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh perubahan iklim, terutama akibat kenaikan permukaan laut yang mengancam keberlangsungan wilayahnya. Dengan kondisi geografis yang rentan, Tuvalu sangat bergantung pada bantuan luar negeri untuk mempertahankan wilayahnya dan secara aktif melakukan diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral, guna memperoleh dukungan internasional (Diba & Indrayani, 2022). Dalam proses diplomasinya, Tuvalu aktif dalam sejumlah

konferensi terkait perubahan iklim, termasuk dalam *Conference of Parties (COP)*² di bawah *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*³. Selain itu, melalui partisipasinya di *Alliance of Small Island States (AOSIS)*⁴, Tuvalu berusaha mendapatkan dukungan global untuk mendesak negara-negara besar mengurangi emisi karbon mereka. Tuvalu juga mendorong pembentukan kerangka hukum internasional yang melindungi hak-hak negara yang terancam kehilangan kedaulatannya akibat perubahan iklim, seperti hak untuk bermigrasi dan mempertahankan kewarganegaraan (Kgomosotho, 2020). Salah satu bentuk upaya diplomasi Tuvalu yang menarik perhatian dunia adalah pidato simbolis Menteri Kehakiman, komunikasi, dan Luar Negeri Tuvalu, Simon Kofe, pada COP26 di Glasgow 2021. Dalam pidato tersebut, Simon Kofe menyampaikan kekhawatiran tentang dampak perubahan iklim sambil berdiri di perairan yang merepresentasikan ancaman kenaikan permukaan laut (Jett, 2021). Aksi ini lah yang penulis jadikan acuan dalam memilih periode dalam penelitian terutama pada masa jabatan Perdana Menteri Kausea Natano pada tahun 2019-2024. Penelitian ini akan melihat bagaimana diplomasi iklim yang Tuvalu lakukan pada periode jabatan PM Natano dan setelahnya terhitung di tahun 2024.

Penelitian ini penting dilakukan karena kenaikan permukaan laut bukan hanya masalah lingkungan saja, tetapi juga masalah yang memicu perdebatan terkait keadilan iklim, tanggung jawab penghasil emisiss karbon yang besar, dan keberlangsungan negara-negara yang terancam tenggelam. Tuvalu menekankan isu keadilan iklim dalam proses diplomasinya sebagai negara kecil yang terdampak atas perubahan iklim khususnya pada kenaikan permukaan laut. Diplomasi Tuvalu dilakukan tidak hanya menjadi alat untuk mendapatkan bantuan finansial dan teknis dari komunitas internasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa isu-isu kritis seperti perubahan iklim tetap menjadi prioritas dalam agenda global.

² *Conference of Parties (COP)* merupakan pertemuan tahunan global yang bertujuan untuk membahas ancaman dari krisis iklim .

³ *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* adalah konvensi yang terbentuk pada tahun 1992 di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung respon global terhadap ancaman perubahan iklim (UNFCCC, 2018).

⁴ *Alliance of Small Island States (AOSIS)* adalah organisasi internasional dengan beranggotakan 39 negara kecil dan berkembang dengan dataran rendah yang bertujuan untuk menyuarakan dan mempengaruhi kebijakan iklim internasional (Bolon, t.t.).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mengamati diplomasi Tuvalu dalam menghadapi ancaman nyata dari kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada Tuvalu, tetapi juga negara-negara kecil kepulauan lainnya yang menghadapi risiko serupa. Kenaikan permukaan laut menjadi ancaman eksistensial yang mengancam kedaulatan negara dan keberlanjutan masyarakat lokal. Berbagai upaya tentunya akan dilakukan Tuvalu untuk mempertahankan kedaulatan negara oleh ancaman kenaikan permukaan laut. Diplomasi menjadi salah satu alat yang Tuvalu gunakan untuk menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut hingga saat ini. Dalam konteks *Paris Agreement*, Tuvalu aktif menyerukan komitmen global untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C, sebagaimana disepakati oleh negara-negara anggota. Namun, ada sejumlah dinamika dalam proses diplomatik yang mempengaruhi efektivitas diplomasi Tuvalu. Salah satu tantangan utamanya adalah kepentingan yang saling bertentangan antara negara berkembang dan negara maju dalam negosiasi perubahan iklim. Beberapa negara maju menunjukkan minat yang rendah untuk memperbaiki kerusakan atau mengambil tindakan serius untuk mengurangi emisi atau memberikan bantuan yang memadai kepada negara-negara yang terkena dampak. Tuvalu juga menghadapi dilema dalam menyeimbangkan diplomasi dengan menjaga hubungan baik dengan mitra internasional karena ketergantungan yang besar pada bantuan internasional. Dengan demikian, muncul pertanyaan untuk mengkaji rumusan masalah penelitian, **“Bagaimana diplomasi Tuvalu dalam menangani ancaman kenaikan permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim tahun 2020-2024?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dampak perubahan iklim khususnya pada kenaikan permukaan laut secara umum dan khusus pada Tuvalu.

2. Menjelaskan diplomasi Tuvalu dalam menangani ancaman kenaikan permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim pada tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu hubungan internasional, khususnya dalam bidang diplomasi lingkungan. Penelitian ini menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana negara kecil seperti Tuvalu mengadopsi strategi diplomasi bilateral dan multilateral untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, sehingga dapat memperkaya literatur tentang diplomasi negara kepulauan kecil dalam konteks perubahan iklim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi diplomat, para pengambil keputusan, organisasi internasional, dan aktivis perubahan iklim dengan menelaah diplomasi Tuvalu dalam memperjuangkan kepentingannya dalam ancaman eksistensial akibat perubahan iklim khususnya kenaikan permukaan laut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan diplomasi negara dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut. Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu peneliti membangun landasan konseptual dan kerangka pemikiran mengenai bagaimana Tuvalu menggunakan diplomasi untuk menangani ancaman dari kenaikan permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim.

Penelitian yang dilakukan oleh Sadai dkk. (2022) dengan judul "*The Paris Agreement and Climate Justice: Inequitable Impacts of Sea Level Rise Associated with Temperature Targets*" berfokus pada implikasi ketidakadilan iklim yang timbul dari target suhu *Paris Agreement* terhadap kenaikan permukaan laut, dengan fokus utama pada negara-negara anggota *Alliance of Small Island States* (AOSIS). Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara target suhu jangka panjang global dalam *Paris Agreement* dan *Climate Justice* terkait kenaikan permukaan laut yang berdampak pada negara-negara kepulauan kecil. Penelitian ini menunjukkan bahwa AOSIS menghadapi kenaikan permukaan laut yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global akibat pencairan es di Antartika. Hal ini menimbulkan tantangan bagi keadilan prosedural (proses pengambilan keputusan) dan distributif (pembagian dampak dan manfaat) dari kebijakan perubahan iklim. Penelitian ini dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi karena dalam penelitian ini membahas peluang diplomasi Tuvalu, serta dampak kenaikan permukaan laut sebagai basis argumen dalam diplomasi iklim global.

Penelitian kedua oleh Alfarizi dkk. (2022) dengan judul “Relevansi Negara Oseania dalam Diplomasi Iklim di PBB” berfokus pada diplomasi iklim negara-negara Oseania di PBB, termasuk memperjuangkan hak mereka dengan menyoroti dampak dari perubahan iklim dalam UNFCCC. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan relevansi antara diplomasi iklim Oseania di PBB dalam memengaruhi rezim iklim global. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi iklim yang dilakukan oleh negara-negara di Oseania menonjolkan inisiatif iklim oleh negara-negara dalam kerangka kerja UNFCCC dalam upaya merealisasikan aksi yang lebih nyata untuk resolusi strategi mitigasi dan adaptasi, mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam rezim iklim internasional di bawah UNFCCC dengan melibatkan aspirasi dan partisipasi negara-negara kecil yang sering kali kurang didengar suaranya dalam proses negosiasi, serta mengakui dan mengintegrasikan pengetahuan masyarakat adat sebagai upaya dari aksi iklim dalam kerangka kerja UNFCCC sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dari negara-negara lain guna memantapkan posisinya sebagai aktor penting. Penelitian ini dapat membantu penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi karena mendalami bagaimana negara-negara Oseania, secara aktif terlibat dalam forum internasional seperti UNFCCC. Dengan berfokus pada isu kenaikan permukaan air laut, penelitian ini menggambarkan bagaimana negara-negara di Oseania memanfaatkan posisinya sebagai negara yang rentan untuk menuntut tindakan dan komitmen yang lebih besar dari negara-negara maju, termasuk bantuan keuangan dan dukungan teknologi.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Mathez (2021) berjudul “*Climate Justice for Tuvalu: Awarding Compensation for Loss and Damages caused by Anthropogenic Climate Change*”. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis mekanisme pemberian kompensasi atau bantuan atas kerugian dan kerusakan yang dihadapi oleh Tuvalu melalui kerangka *Climate Justice*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi parameter ganti rugi atau bantuan yang adil bagi Tuvalu berdasarkan konsep *Climate Justice*, serta membahas prinsip-prinsip yang dapat menyelesaikan kebuntuan politik internasional dengan menawarkan prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak (negara maju, negara berkembang, dan komunitas global) sehingga dapat dipecahkan dan solusi

konkret bisa dicapai terkait isu ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *Polluter Pays* merupakan prinsip yang paling sesuai dibandingkan dengan prinsip lainnya karena mempertimbangkan perspektif dari Tuvalu dan negara yang memberikan ganti rugi guna mendukung alokasi ganti rugi yang adil. Prinsip *Polluter Pays* menekankan pada akuntabilitas, yang berfungsi sebagai pencegah kerusakan di masa depan dengan memastikan komitmen seperti mencegah terulangnya kembali dan mengambil tindakan mitigasi. Bagi masyarakat Tuvalu, prinsip ini merupakan jalan menuju keadilan dan pemulihan moral, menawarkan jaminan bahwa penderitaan mereka akan diatasi dan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari bahaya serupa di masa depan.

Penelitian keempat oleh Malla (2024) dengan judul “*Climate Diplomacy: Implication and Prospects for Nepal*” menjelaskan bagaimana strategi-strategi yang Nepal lakukan dalam mengatasi perubahan iklim melalui diplomasi. Penelitian ini mengkaji peran dari diplomasi iklim dalam membantu mengatasi permasalahan yang Nepal hadapi serta memberikan strategi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan dalam menangani perubahan iklim. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meningkatkan diplomasi iklim sebagai alat strategis sangat penting bagi Nepal untuk mengatasi tantangan iklim dan mengadvokasi kesetaraan dalam kebijakan iklim internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa Nepal menerima dampak perubahan iklim yang cukup parah meskipun menjadi negara yang menyumbangkan gas emisi rumah kaca global yang sangat rendah. Aksi atas respon perubahan iklim sudah difasilitasi dengan dibentuknya institusi seperti *Climate Change Council*, namun masih ada kesenjangan terutama pada pendanaan dan kapasitas teknis. Selain itu, Nepal juga memiliki peluang untuk meningkatkan posisinya dalam menghadapi perubahan iklim melalui kemitraan internasional yang diperoleh dari the *Loss and Damage Fund COP28*. Penelitian ini dapat membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi karena memberikan contoh bagaimana sebuah negara kecil yang rentan terhadap perubahan iklim dapat menggunakan diplomasi untuk menggalang dukungan internasional. Penelitian ini menyajikan strategi yang dapat diterapkan, seperti meningkatkan kemitraan dan terlibat dengan koalisi regional dan global Nepal melalui diplomasi iklim.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Armstrong & Corbett (2020) dengan judul “*Climate change, sea level rise, and maritime baselines: Responding to the plight of low-lying atoll states*” berfokus pada eksplorasi pada zona maritim yang ditentukan oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 yang dapat berubah seiring dengan mundurnya garis pantai akibat perubahan iklim. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan solusi yang adil bagi negara-negara atol untuk mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka meskipun wilayah mereka benar-benar tenggelam. Penelitian ini menunjukkan bahwa solusi yang paling adil adalah memperbaiki garis dasar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ada saat ini, bahkan jika daratan negara-negara atol menghilang sepenuhnya. Studi ini mengadvokasi hak-hak maritim yang harus dipertahankan bagi masyarakat yang terkena dampak sebagai bagian dari tanggung jawab global terhadap keadilan iklim. Penelitian ini dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis mereka dengan menawarkan wawasan tentang bagaimana pendekatan keadilan global dapat digunakan dalam diplomasi Tuvalu untuk mendapatkan dukungan internasional.

Penelitian keenam oleh Morgan dkk. (2024) dengan judul “*Leading from the Frontline: A History of Pacific Climate Diplomacy*” berfokus pada peran Forum Pasifik Selatan, yang sekarang dikenal sebagai Forum Kepulauan Pasifik atau *Pacific Islands Forum* (PIF), dalam mendorong dialog mengenai isu-isu iklim. Penelitian ini menyoroti kolaborasi dan gesekan antara negara-negara Kepulauan Pasifik dan Australia. Meskipun Australia adalah anggota PIF yang paling berpengaruh, Australia merupakan pengeksplor bahan bakar fosil terbesar ketiga di dunia, setelah Rusia dan Arab Saudi. Peran ganda ini sering kali menciptakan perbedaan yang signifikan antara sikap Australia dalam diplomasi iklim global dan prioritas negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya. Penelitian ini menjelaskan bagaimana negara-negara kepulauan di Pasifik termasuk Tuvalu, berperan dalam membentuk kebijakan untuk mengurangi emisi dan memperjuangkan di tingkat global. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik telah memberikan pengaruh yang besar dalam negosiasi iklim global dengan menggunakan diplomasi untuk membentuk kerja sama internasional di PBB. Terlepas dari keberhasilan ini, negara-negara ini menghadapi tantangan karena

pendekatan Australia yang kontras karena memprioritaskan perluasan ekspor batu bara dan gas ke pasar Asia daripada pengurangan emisi yang ambisius.

Penelitian ketujuh oleh Tol & Dvorskas (2018) dengan judul “*Economic of Sea Level Rise*” berfokus pada dampak secara langsung dan tidak langsung di wilayah pesisir dalam menghadapi kehilangan lahan, erosi, banjir, dan intrusi air laut, serta tantangan untuk beradaptasi melalui langkah-langkah seperti membangun tanggul atau migrasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi biaya dan manfaat dari berbagai strategi adaptasi, dan menyoroti bahwa tindakan perlindungan seperti tanggul lebih hemat biaya daripada perpindahan penduduk dalam skala besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak langsung dari kenaikan permukaan laut meliputi erosi, banjir, intrusi air laut, dan degradasi lahan pertanian. Langkah-langkah perlindungan pantai, seperti membangun tanggul, dinilai lebih hemat biaya dibandingkan dengan melakukan migrasi, terutama di wilayah yang berpenduduk padat. Kenaikan permukaan laut dapat menyebabkan kerugian ekonomi berkisar antara 0,3 persen hingga 9,3 persen dari PDB global, tergantung pada skenario perubahan iklim yang diadopsi. Adaptasi dianggap sebagai kebijakan yang lebih realistis dibandingkan dengan mitigasi penuh karena permukaan air laut merespons secara lambat terhadap pengurangan emisi.

Penelitian terakhir oleh Saddington (2023) yang berjudul “*The Chronopolitics of Climate Change Adaptation: Land Reclamation in Tuvalu*” mengeksplorasi bagaimana proyek reklamasi lahan di Tuvalu memiliki dua tujuan. Penelitian ini mengkaji interaksi antara upaya adaptasi dan geopolitik, dengan fokus pada bagaimana persepsi waktu dan urgensi mempengaruhi keputusan terkait iklim. Pendekatan ini menekankan pada hubungan antara tindakan politik dan waktu, serta menyoroti bagaimana para pemimpin Tuvalu menavigasi tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya reklamasi lahan secara strategis bagi Tuvalu, memosisikannya sebagai solusi logis untuk bertahan hidup dan menjadi alat untuk menegaskan keberlanjutan Tuvalu di tengah ancaman kenaikan permukaan laut. Dengan mengaitkan langkah-langkah adaptasi dengan kedaulatan, studi ini memberikan perspektif tentang bagaimana negara kepulauan

kecil seperti Tuvalu memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mengatasi perubahan iklim sambil mempertahankan posisi geopolitik mereka.

Secara keseluruhan, penelitian terkait diplomasi Tuvalu dalam menangani ancaman kenaikan permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim masih terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada keadilan iklim dalam konteks dampak ketidaksetaraan perubahan iklim terhadap negara-negara kepulauan kecil, diplomasi iklim di PBB, serta strategi negara-negara Kawasan dalam menghadapi tantangan eksistensial akibat kenaikan permukaan laut. Namun, penelitian mendalam mengenai Tuvalu spesifik dalam diplomasi iklim, termasuk negosiasi, advokasi hukum, dinamika diplomasi, serta upaya mendapatkan kompensasi atas kerugian dan dampak perubahan iklim, masih jarang ditemukan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis pendekatan Tuvalu dalam diplomasi iklim untuk memperjuangkan haknya sebagai pulau kecil dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim pada tahun 2020-2024.

2.2 Landasan Konseptual

Peneliti menggunakan satu konsep utama dalam menyusun penelitian ini, yaitu dengan menggunakan konsep *climate diplomacy* atau diplomasi iklim. Dengan konsep ini, penelitian dilakukan untuk menjelaskan lebih dalam bagaimana Tuvalu mengoptimalkan peran diplomasi untuk menekankan ancaman kenaikan permukaan laut di ranah internasional.

2.2.1 Climate Diplomacy

Dalam buku '*Global Diplomacy*' yang ditulis oleh Holmes & Rofe (2016), diplomasi merupakan sarana untuk memfasilitasi komunikasi antar budaya, membentuk fondasi untuk hubungan antara individu dan masyarakat, termasuk aspek-aspek seperti perdamaian dan konflik, perdagangan dan pertukaran, serta berfungsi untuk meningkatkan kesadaran terhadap interaksi di berbagai tingkatan. Menurut Barston (2019), diplomasi merupakan mekanisme yang dilakukan oleh negara melalui perwakilan resmi atau aktor lainnya yang bertujuan untuk mengekspresikan, mengoordinasikan, dan melindungi kepentingannya melalui

berbagai cara, seperti komunikasi, diskusi pribadi, pertukaran pandangan, lobi, kunjungan, ancaman, dan aktivitas serupa lainnya. Selain itu, Balzacq dkk. (2019) mengatakan bahwa diplomasi merupakan suatu praktik dan pendekatan untuk mewakili suatu negara dalam interaksi dengan negara asing dan dalam negosiasi internasional. Holmes & Rofe juga menekankan bahwa diplomasi sangat penting untuk mengeksplorasi isu-isu global seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, perdagangan dan pembangunan serta memungkinkan untuk memahami, terlibat, dan mempengaruhi aktor lain.

Terdapat tiga aktivitas kunci yang dilakukan dalam proses diplomasi yaitu, komunikasi, representasi, dan negosiasi. Komunikasi merupakan inti dari proses diplomasi karena membutuhkan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat, dan juga kemampuan emosional untuk berinteraksi dengan orang lain sedemikian rupa sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami disampaikan dengan baik. Representasi juga menjadi aspek kunci karena aktor dari proses diplomasi berbicara atas nama kelompok, komunitas, atau negara untuk mengartikulasikan kepentingan mereka dengan jelas. Hal ini sangat penting terutama ketika ada risiko bahwa pesan yang disampaikan akan tenggelam karena terlalu banyak isu dan kepentingan. Proses negosiasi juga menjadi hal yang penting karena perwakilan dengan posisi yang berbeda berbicara untuk menemukan titik temu. Bahkan jika solusi langsung tidak ditemukan, melanjutkan dialog seringkali memiliki hasil akhir yang bermanfaat (Holmes & Rofe, 2016).

Dalam proses pelaksanaannya, metode diplomasi dibagi menjadi beberapa jenis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Metode diplomasi tersebut dilaksanakan dan dibagi menjadi diplomasi bilateral dan multilateral, transnasional, sosial dan ekonomi, dan secara terbuka, tertutup ataupun rahasia (Holmes & Rofe, 2016). Dalam penelitian ini, metode diplomasi bilateral dan multilateral menjadi sub-konsep dalam menjelaskan diplomasi Tuvalu dalam usahanya menangani tantangan lintas batas seperti kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Guna mengatasi ancaman yang berkelanjutan ini, munculah pendekatan yang dikenal sebagai diplomasi iklim atau *climate diplomacy*.

Climate diplomacy atau diplomasi iklim adalah aksi dan proses dalam membentuk rezim perubahan iklim internasional dan memastikan tindakan yang semestinya dilakukan berjalan dengan efektif. Diplomasi iklim telah dilakukan selama tiga dekade semenjak negosiasi UNFCCC pada tahun 1990 (Mabey dkk., 2013). Diplomasi iklim menggunakan cara-cara diplomatik untuk mengatasi tantangan perubahan iklim di tingkat internasional dan nasional. Hal ini termasuk berpartisipasi dalam negosiasi, membangun aliansi dan kemitraan, serta mendorong kerja sama yang efektif dan dampaknya terhadap hubungan internasional (Locci & Jammoul, 2023). Dengan kata lain, melalui konsep ini akan dilihat bagaimana Tuvalu dapat memastikan bahwa rezim iklim internasional tidak hanya berorientasi pada kebijakan mitigasi global, tetapi juga melindungi dan memberikan keadilan bagi negara-negara yang menghadapi ancaman eksistensial dari perubahan iklim.

Diplomasi iklim berfokus pada upaya dan proses dalam membangun dan mempertahankan kerangka kerja internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Perkembangan diplomasi iklim telah memainkan peran penting dalam membentuk pembuatan dan fungsi perjanjian iklim internasional. Diplomasi iklim sangat penting untuk memahami hubungan yang kompleks antara perjanjian iklim internasional, yang dapat bersifat abstrak, dan sering kali bertentangan dengan kepentingan nasional, termasuk kerentanan iklim, peluang dalam industri rendah karbon, resiko terhadap aset karbon tinggi, kedaulatan nasional, dan persepsi keadilan (Mabey dkk., 2013).

Diplomasi iklim dapat dilakukan dengan cara yang kreatif dan proaktif apabila menginginkan hasil yang efektif. Secara tradisional, diplomasi sebelumnya selalu dilihat sebagai disiplin yang reaktif atau tidak membentuk arah kebijakan global namun hanya menanggapi tekanan dari luar saja. Oleh sebab itu, dalam menjalankan diplomasi iklim diperlukan tiga kemampuan dalam implementasinya. Yang pertama yaitu pemahaman akan posisi sendiri dengan jelas. Kedua, perlunya memahami negara atau aktor lain. Hal ini termasuk kapasitas dalam memperoleh dan menganalisis informasi terkait kepentingan, keterbatasan, kapasitas aktor atau negara-negara lainnya, serta mengartikan sikap dan tindakan kita. Yang ketiga, kemampuan untuk mempengaruhi. Kemampuan ini diharapkan dapat

menyesuaikan kepentingan nasional melalui jalur diplomasi dan politik secara luas dengan menggunakan keterampilan dalam berdiplomasi untuk memberikan pengaruh yang efektif, menjalin aliansi, membangun kepercayaan, dan memberikan pesan di berbagai kesempatan dan saluran, baik secara publik maupun tertutup (Mabey dkk., 2013).

Diplomasi iklim tidak hanya dilakukan untuk melakukan kompromi dan membuat kesepakatan saja, namun dilakukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan solusi dalam jangka panjang. Diplomasi iklim harus berhasil mengatasi isu-isu inti yang mendasari gagalnya kerja sama internasional. Selain itu, diplomasi iklim bukan hanya tanggungjawab dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan atau Perubahan Iklim saja. Diplomasi iklim merupakan kegiatan yang melibatkan semua aktor pemerintah dan non-pemerintah (Mabey dkk., 2013). Dalam pelaksanaannya, Apriliani (2024) menyebutkan diplomasi iklim melibatkan berbagai aktor di tingkat nasional dan internasional serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara, organisasi internasional, dan aktor non-pemerintah, yang memainkan peran penting dalam membentuk keberhasilan dan dampak dari upaya global untuk mengelola dan mengatasi perubahan iklim.

A. Diplomasi Bilateral

Diplomasi bilateral merupakan hubungan strategis antara dua negara yang dilaksanakan melalui institusi, seperti kementerian luar negeri, kedutaan besar, konsulat, serta melalui pertukaran di tingkat kepala negara atau pemerintahan (Pannier, 2020). Diplomasi menjadi instrumen utama dalam mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional, yang meliputi berbagai sektor penting. Diplomasi bilateral juga mencakup interaksi antara masyarakat sipil dan pemangku kepentingan swasta, yang secara kolektif turut membentuk proses negosiasi dan kerja sama di berbagai tingkatan hubungan internasional. Diplomasi bilateral sendiri memiliki tiga fungsi utama yaitu, *representing, informing, negotiating and cooperating* (Pannier, 2020).

Hubungan bilateral bersifat dinamis dan fleksibel, memungkinkan terjadinya konflik dan kerja sama secara bersamaan dalam satu relasi. Selama hubungan tersebut masih berlangsung, selalu ada ruang untuk perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika kepentingan kedua negara. Tidak hanya terbatas pada negara-negara tetangga atau sekutu, hubungan bilateral juga dapat terbentuk dalam berbagai jenis, seperti kemitraan global, kemitraan strategis, dan dialog keamanan. Jenis-jenis ini seringkali mendorong terlaksananya konferensi tingkat tinggi (KTT). Pertemuan semacam ini tidak hanya memperkuat sinyal diplomatik mengenai pentingnya hubungan tersebut, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat kerja sama, menyelesaikan isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh kedutaan, serta menghasilkan deklarasi atau perjanjian yang bersifat mengikat baik dalam bentuk perjanjian antar pemerintah, kerja sama teknis, maupun kesepakatan perdagangan (Pannier, 2020).

Diplomasi bilateral memainkan peran dalam membentuk posisi dan efektivitas suatu negara dalam diplomasi multilateral. Penyelarasan kepentingan antara dua negara dimulai di tingkat bilateral, yang berfungsi sebagai dasar untuk membangun koalisi yang lebih luas di forum internasional. Sebelum memasuki negosiasi multilateral formal seperti di PBB dan agenda lainnya, negara-negara sering kali terlibat dalam diskusi bilateral terlebih dahulu untuk menguji gagasan, membangun kepercayaan, dan menyelaraskan strategi. Interaksi bilateral ini dapat secara signifikan mempengaruhi arah kebijakan nasional dan taktik negosiasi, terutama ketika hubungan tersebut dianggap strategis secara politis. Bahkan, sebuah negara terkadang dapat mengadopsi posisi di arena multilateral yang tampaknya menyimpang dari kepentingan nasionalnya untuk mempertahankan atau memperkuat kemitraan bilateralnya. Dengan demikian, diplomasi bilateral tidak hanya beroperasi bersamaan dengan keterlibatan multilateral, tetapi juga seringkali berperan sebagai alat yang mendorong atau membentuk substansi kerja sama internasional (Pannier, 2020).

Diplomasi bilateral memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat kepentingan nasional suatu negara melalui institusi resmi dan hubungan lintas sektor, termasuk dalam konteks negara kecil dan rentan seperti

Tuvalu. Sebagai negara yang menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut, Tuvalu memanfaatkan diplomasi bilateral tidak hanya untuk menjalin kerja sama teknis dan kemanusiaan, tetapi juga untuk memperkuat posisinya dalam forum multilateral. Hubungan bilateral Tuvalu dengan negara-negara mitra, seperti Australia melalui *Falepili Union Treaty*, menjadi bukti bagaimana kerja sama dua negara dapat melahirkan solusi konkret atas krisis yang tidak dapat ditangani sendiri, seperti relokasi warga, bantuan pembangunan, dan perlindungan hukum. Dalam kerangka ini, Tuvalu juga menunjukkan bahwa diplomasi bilateral bukanlah sekadar komunikasi formal, tetapi mencakup pertukaran kepercayaan, penyelarasan strategi, dan pembentukan posisi bersama sebelum memasuki arena negosiasi global seperti COP atau UNGA. Hal ini menegaskan bahwa diplomasi bilateral tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelindung kepentingan nasional, tetapi juga sebagai fondasi diplomasi multilateral dan sebagai upaya mempertahankan eksistensi negara di tengah krisis global.

B. Diplomasi Multilateral

Multilateral diplomasi adalah bentuk diplomasi yang melibatkan tiga negara atau lebih dalam proses negosiasi, yang biasanya berlangsung melalui konferensi internasional atau organisasi internasional. Berbeda dari diplomasi bilateral yang terbatas pada hubungan dua negara, multilateral diplomacy menempatkan banyak negara dalam satu forum untuk membahas isu bersama yang bersifat global, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, atau perdamaian dunia. Menurut Diplomasi multilateral telah berkembang pesat sejak abad ke-20 seiring meningkatnya jumlah negara dan kompleksitas isu-isu global, serta kepercayaan negara-negara berkembang bahwa jalur konferensi internasional memberikan peluang pengaruh yang lebih besar dalam sistem internasional (Mahbubani, 2022).

Fungsi utama dari diplomasi multilateral antara lain mencakup penyusunan norma internasional, perumusan tujuan pembangunan global, serta negosiasi perjanjian internasional yang berdampak besar terhadap perdamaian dan keamanan global, seperti Konvensi Hukum Laut (UNCLOS). Proses ini memperkuat hukum internasional dan menciptakan landasan bagi stabilitas dunia. Selain itu, diplomasi

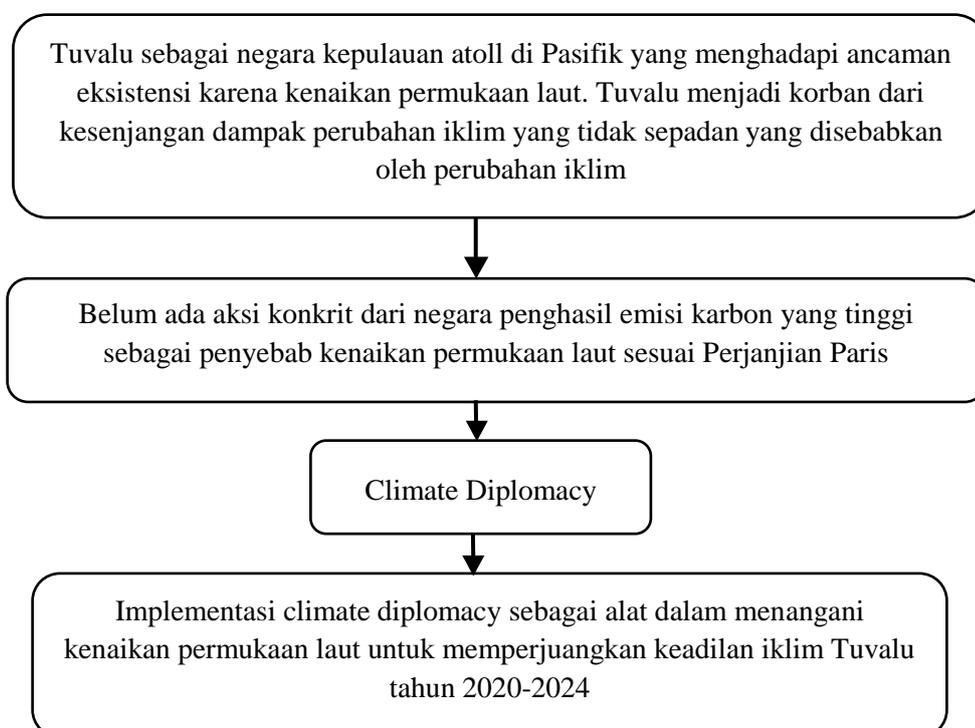
multilateral juga memfasilitasi kolaborasi dalam menghadapi tantangan lintas batas seperti pandemi, perubahan iklim, dan krisis keuangan global (Mahbubani, 2022).

Namun, diplomasi multilateral tidak terlepas dari tantangan inheren. Ketegangan antara prinsip keadilan dan kepentingan kekuasaan, serta antara kedaulatan nasional dan kebutuhan akan solusi global, seringkali menghambat efektivitas proses multilateral. Dominasi negara-negara besar dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan PBB menjadi contoh nyata di mana kekuasaan seringkali mengalahkan prinsip universal. Meskipun demikian, sejarah menunjukkan bahwa ketika dunia dihadapkan pada ancaman bersama, multilateral diplomasi tetap menjadi platform paling rasional dan inklusif dalam mencari jalan keluar (Mahbubani, 2022).

Diplomasi Tuvalu sendiri dalam kerangka multilateral dapat dilihat melalui partisipasi aktifnya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negosiasi pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP), dimana Tuvalu menyerukan untuk meningkatkan upaya pada pengurangan emisi oleh negara-negara maju dan akses yang lebih besar terhadap pendanaan iklim untuk adaptasi dan mitigasi. Tuvalu juga membangun aliansi strategis dengan negara-negara kepulauan kecil melalui Aliansi Negara Kepulauan Kecil (AOSIS) dan aliansi lainnya untuk memperkuat posisi dalam negosiasi global. Pada aspek hukum dan kebijakan, Tuvalu juga mengadvokasi pengakuan atas dampak kenaikan permukaan laut terhadap batas-batas maritim dan kedaulatan teritorial di berbagai forum internasional.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran yang menjelaskan kondisi Tuvalu sebagai negara kepulauan atoll di Pasifik yang menghadapi ancaman eksistensi karena kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sebagai negara dengan populasi yang kecil dan penghasil emisi karbon yang cukup kecil, Tuvalu menjadi aktor utama sebagai korban dari dampak perubahan iklim yang tidak sepadan. Masalah perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut bukanlah masalah yang Tuvalu hadapi sendiri. Hal ini merupakan isu global yang memerlukan perhatian dan menjadi tanggung jawab bersama. Penelitian ini akan membahas bagaimana Tuvalu menyoroti ketidakadilan yang terjadi karena menyumbang emisi yang cukup rendah namun mengalami dampak yang sangat besar, serta melihat dampak pendekatan diplomasi Tuvalu dalam kebijakan perubahan iklim global dan bagaimana pendekatan ini dapat memperkuat posisi negara-negara kecil lainnya yang menghadapi ancaman yang sama pada periode 2020-2024.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terkait dengan individu atau kelompok serta isu-isu dan fenomena sosial yang terjadi (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian kualitatif deskriptif digunakan karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena melalui data empiris yang relevan dengan topik penelitian. Jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana Tuvalu memanfaatkan diplomasi dengan menekankan keadilan iklim di panggung internasional dalam menghadapi ancaman dari kenaikan permukaan laut.

Penelitian kualitatif deskriptif ini akan dilakukan sesuai dengan pedoman yang dijelaskan oleh Bryman (2016). Penulis akan memulai penelitian dengan menetapkan pertanyaan penelitian mengenai diplomasi Tuvalu, kemudian dilanjutkan dengan menentukan topik penelitian, mengumpulkan data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, dan menganalisis data yang relevan. Penelitian ini diakhiri dengan membuat kesimpulan yang mendalam dan sistematis tentang diplomasi Tuvalu dalam menangani kenaikan permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan diplomasi Tuvalu sebagai mekanisme untuk memperjuangkan keadilan di tingkat internasional dalam

menangani kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Penelitian ini akan berfokus pada diplomasi Tuvalu dengan tujuan penelitian agar dapat melihat langkah-langkah diplomatik Tuvalu sebagai alat dalam menghadapi ancaman dari fenomena kenaikan permukaan laut, baik melalui diplomasi bilateral maupun diplomasi multilateral dengan memanfaatkan forum-forum global seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, *Conference of Parties (COP)*, dan peran aktifnya pada aliansi negara kecil seperti *Alliance of Small Island State (AOSIS)* dari tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, dalam memperoleh dukungan secara finansial dan teknis untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Tuvalu menyampaikan tuntutanannya atas perubahan iklim dari tahun 2020 hingga 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dalam menjelaskan diplomasi Tuvalu dalam menangani fenomena kenaikan permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup:

1. Laporan organisasi internasional seperti *The United Nations* (https://www.un.int/tuvalu/statements_speeches), *United Nations Framework Convention on Climate Change* (<https://www.unfccc.int>), *Intergovernmental Panel on Climate Change* (<https://www.ipcc.ch>), *the World Bank* (<https://www.worldbank.org>), *Alliance of Small Island States* (<https://www.aosis.org>) terkait Tuvalu dan fenomena kenaikan permukaan laut.
2. Situs web, dokumen, dan pernyataan resmi pemerintah Tuvalu terkait diplomasi Tuvalu dan fenomena kenaikan permukaan laut (tuvaluclimatechange.gov.tv).
3. Artikel jurnal akademik yang membahas terkait diplomasi Tuvalu dan fenomena kenaikan permukaan laut.

4. Laporan tahunan dan publikasi resmi lainnya dari lembaga-lembaga terkait yang merinci tentang kenaikan permukaan laut terutama di Kawasan Pasifik (pacificclimatechange.net).
5. Platform atau basis data perubahan iklim khususnya pada kenaikan permukaan laut, seperti NASA (<https://www.sealevel.nasa.gov>).
6. Artikel berita, sosial media, serta analisis dari *platform* media massa internasional yang membahas terkait diplomasi Tuvalu dan fenomena kenaikan permukaan laut seperti theguardian.com, nbcnews.com, bbc.com, dan cnn.com.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui satu metode utama, yaitu melalui studi dokumen secara mendalam. Teknik pengumpulan data ini dilakukan sesuai dengan panduan penelitian kualitatif deskriptif yang dijelaskan oleh Bryman (2016), dengan tujuan memperoleh data yang komprehensif dan mendalam. Peneliti akan memanfaatkan data yang tersedia secara publik oleh UNFCCC, COP, IPCC, the World Bank, AOSIS, dan NASA yang menyediakan data terkait perubahan iklim khususnya pada kenaikan permukaan laut global. Peneliti juga menggunakan dokumen, situs web, serta pernyataan resmi pemerintah Tuvalu agar dapat memahami langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Tuvalu dalam menangani isu kenaikan permukaan laut. Selain itu, artikel jurnal, laporan akademik, serta sumber berita yang kredibel juga akan digunakan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena kenaikan permukaan laut pada diplomasi Tuvalu.

3.5 Teknik Analisis Data

Penulis akan menggunakan teknik analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman (2014). Proses analisis data ini melibatkan tiga alur aktivitas, antara lain kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dkk., 2014). Proses ini digunakan untuk menganalisis data secara sistematis agar penelitian ini

dapat menarik kesimpulan yang jelas terkait diplomasi Tuvalu dalam menangani kenaikan permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim, dengan menggunakan konsep *climate diplomacy* untuk melakukan kerja sama di tingkat internasional dan menuntut tanggung jawab kepada negara-negara besar atas dampak dari perubahan iklim.

Pada tahap kondensasi data, peneliti akan mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang memiliki kesesuaian antara narasi dan langkah diplomasi Tuvalu dalam menangani kenaikan permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim. Data yang dimaksud dapat berfokus pada aktor, strategi diplomasi, dan hasil dari pendekatan yang dilakukan. Kemudian peneliti akan melakukan pengelompokan data yang sudah terkumpul. Terakhir, akan dilakukan penyederhanaan data yang berguna untuk membantu peneliti memahami keterkaitan antara diplomasi Tuvalu dengan keberhasilan atau tantangan dalam menangani kenaikan permukaan laut. Berikutnya yaitu tahapan penyajian data, pada bagian ini bertujuan untuk menyajikan data yang mudah dipahami berdasarkan data yang telah disederhanakan pada tahapan sebelumnya. Dengan disajikannya data yang telah terorganisir dan disederhanakan, hal ini memungkinkan peneliti untuk membangun narasi terkait bagaimana Tuvalu menggunakan *climate diplomacy* untuk menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut. Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Tahap ini adalah proses interpretasi data yang sudah disederhanakan, kemudian menarik kesimpulan yang relevan. Tahap ini melibatkan analisis bagaimana Tuvalu menggunakan diplomasi dengan memanfaatkan konsep *climate diplomacy* untuk mendukung mitigasi dan adaptasi kenaikan permukaan laut.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana diplomasi Tuvalu dalam menangani ancaman kenaikan permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut telah menjadi ancaman eksistensial bagi Tuvalu sebagai negara kepulauan kecil dengan elevasi rendah di kawasan Pasifik. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mulai dari kerusakan infrastruktur, intrusi air asin, hingga hilangnya lahan pertanian dan terganggunya ketahanan pangan. Dalam konteks ini, diplomasi menjadi instrumen utama yang digunakan oleh Tuvalu untuk memastikan kelangsungan negaranya di tengah krisis iklim yang tidak mereka sebabkan.

Tuvalu menjalankan strategi diplomasi aktif dan progresif baik melalui forum multilateral seperti UNFCCC dan COP, maupun melalui kerja sama bilateral dengan negara-negara seperti Australia. Dalam forum internasional, Tuvalu konsisten menekankan *climate justice*, yaitu seruan bahwa negara-negara dengan kontribusi rendah terhadap emisi global tidak boleh menanggung beban terbesar tanpa dukungan dari negara-negara penghasil emisi yang besar. Diplomasi ini tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknologi, tetapi juga untuk memperjuangkan pengakuan hukum internasional terhadap status kenegaraan Tuvalu, bahkan jika suatu saat wilayah tidak lagi dapat dihuni.

Melalui pendekatan diplomatik yang terstruktur, Tuvalu memperkuat posisinya sebagai suara moral dalam perjuangan global menghadapi perubahan iklim. Kerja sama bilateral seperti *Falepili Union* dengan Australia menjadi wujud konkret dari diplomasi yang menggabungkan aspek perlindungan manusia, keberlanjutan pembangunan, dan pertahanan kedaulatan negara. Kesepakatan ini

menyediakan jalur migrasi bermartabat bagi warga Tuvalu, sekaligus menegaskan bahwa identitas dan eksistensi Tuvalu akan tetap diakui meskipun wilayahnya terdampak parah oleh kenaikan permukaan laut. Strategi diplomasi Tuvalu juga menyentuh aspek digital dan hukum internasional, seperti inisiatif “*digital nation*” untuk mempertahankan status negara dalam tatanan global.

Respon terhadap diplomasi Tuvalu menunjukkan adanya peningkatan perhatian internasional terhadap isu kenaikan permukaan laut sebagai ancaman eksistensial bagi negara-negara kepulauan kecil. Meskipun tidak semua negara memberikan dukungan langsung terhadap tuntutan Tuvalu, beberapa pihak seperti Australia, negara-negara Pasifik, serta organisasi internasional telah menunjukkan komitmen melalui kerja sama hukum, pendanaan adaptasi, dan penguatan advokasi di forum multilateral. Hal ini mencerminkan bahwa diplomasi iklim Tuvalu berhasil membangun solidaritas global, meski tantangan dalam mewujudkan keadilan iklim secara merata masih terus berlangsung.

Namun demikian, dari keseluruhan proses diplomasi yang dilakukan Tuvalu, terlihat bahwa diplomasi bilateral justru memberikan hasil yang lebih konkret dan operasional dibandingkan diplomasi multilateral. Hal ini dapat dipahami karena dalam forum multilateral, setiap negara membawa kepentingannya masing-masing, sehingga kesepakatan cenderung bersifat umum dan kompromis. Sebaliknya, dalam diplomasi bilateral, Tuvalu mampu merumuskan kerja sama yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan eksistensial negaranya, seperti yang tercermin dalam *Falepili Union Treaty* dengan Australia. Meskipun secara frekuensi dan intensitas Tuvalu lebih aktif di forum multilateral, hasil-hasil yang nyata atas tuntutannya lebih banyak dicapai melalui jalur bilateral. Oleh karena itu, penguatan diplomasi bilateral yang strategis menjadi penting sebagai pelengkap atas perjuangan multilateral dalam memastikan keberlanjutan masa depan Tuvalu di tengah ancaman krisis iklim global.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menganalisis diplomasi Tuvalu dalam menangani ancaman kenaikan permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim,

terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan untuk penguatan kebijakan dan studi lanjutan di masa depan. Pertama, pemerintah Tuvalu diharapkan dapat terus memperluas kemitraan bilateral dan regional yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur adaptif, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, dan pelibatan generasi muda dalam diplomasi iklim. Pendekatan adaptasi yang hanya bersifat reaktif perlu dilengkapi dengan strategi yang mendorong kemajuan atau perubahan guna memberdayakan masyarakat lokal dan memperkuat posisi negara dalam forum internasional. Kedua, komunitas internasional, khususnya negara-negara maju, perlu mempercepat implementasi komitmen pendanaan iklim, memperluas akses Tuvalu terhadap teknologi adaptasi, serta memberikan dukungan diplomatik terhadap pengakuan status kenegaraan tanpa batas geografis. Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, disarankan untuk melanjutkan kajian tentang diplomasi iklim dari perspektif negara-negara mikro dan pulau kecil, serta menelaah keterkaitannya dengan hak asasi manusia, hukum internasional, dan ketahanan budaya untuk memahami bagaimana krisis iklim dapat mengubah struktur hubungan internasional. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana diplomasi dari negara kecil seperti Tuvalu menjadi representasi dari perjuangan keadilan iklim global, sekaligus membuka ruang untuk redefinisi hak negara atas eksistensi di tengah krisis iklim yang kian memburuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. S. R., Danastri, H. D., Maulidina, P. D. C., Junadhi, F., Shakila, L. M., & Aulia, T. A. (2022). Relevansi Negara Oseania dalam Diplomasi Iklim di PBB. *Jurnal Good Governance*, *10*(1), 1–20.
- Apriliani, D., Universitas, D., & Bandung, A.-G. (2024). Climate Change Diplomacy: Towards Sustainable Global Cooperation. *Social Studies & Humanities Journal (SOSHUM)*, *1*(1), 31–42. <https://journal.ppipbr.com/index.php/soshum>
- Armstrong, C., & Corbett, J. (2020). Climate change, sea level rise, and maritime baselines: Responding to the plight of low-lying atoll states. *Global Environmental Politics*, *21*(1), 89–107. https://doi.org/10.1162/glep_a_00564
- Baichang, C. (2023, Juni 22). Tanggapi Perubahan Iklim, Presiden Tsai: Bantu Tuvalu dalam Membangun Sistem Respons yang Tangguh. *RTI*. <https://id.rti.org.tw/news/view/id/102418>
- Balzacq, T., Charillon, F., & Ramel, F. (2019). Introduction: History and Theories of Diplomacy. Dalam *Global Diplomacy* (1 ed.). Palgrave Macmillan Cham. <https://doi.org/doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3>
- Barston, R. P. (2019). *Modern Diplomacy* (Fifth Edition). Routledge. New York.
- Bolon, C. (t.t.). 1.5 to Stay Alive: The Influence of AOSIS in International Climate Negotiations Written by Cecelia Bolon. *E-International Relations*. Diambil 25 April 2025. <https://www.e-ir.info/2018/11/17/1-5-to-stay-alive-the-influence-of-aosis-in-international-climate-negotiations/>

- Boom, K., Richards, J.-A., & Leonard, S. (2016). *CLIMATE JUSTICE: The international momentum towards climate litigation*. Heinrich-Böll-Stiftung & Climate Justice Programme.
- Bryman, Alan. (2016). *Social research methods* (Fifth Edition). Oxford University Press.
- Chanel 4 News. (2024, September 28). *The Fight to save a sinking island from being lost to climate change*. YouTube. Diambil 20 April 2025. <https://youtu.be/w4szDwMHx3o?si=qsNGnAx7MR5bjgcR>
- CLIMATEWATCH. (2021). *Historical GHG Emission*. Climatewatchdata.Org. Diambil 14 Maret 2025. https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?breakBy=countries&calculation=ABSOLUTE_VALUE&chartType=line&end_year=2021®ions=BRA%2CCAN%2CCHN%2CIND%2CIDN%2CIRN%2CJPN%2CRUS%2CTUV%2CUSA%2CDEU&source=Climate%20Watch&start_year=2010
- Conroy, P. (2024, Agustus 28). *The Falepili Union: A Pacific response to the greatest global challenges*. Theinterpreter. Diambil 14 April 2025. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/falepili-union-pacific-response-greatest-global-challenges>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth). Sage Publications. Los Angeles.
- Diba, F., & Indrayani, I. (2022). AUSTRALIAN FOREIGN AID MOTIVATION FOR TUVALU IN EFFORTS TO COPE WITH CLIMATE CHANGE 2015-2020. *Journal of Social Political Sciences JSPS*, 3(1).
- Elliott, D., & Cook, L. F. (2016). *Climate justice and the use of human rights law in reducing greenhouse gas emissions*. Quaker United Nations Office. Geneva.

- Giraudeau, G. (2022). Pacific Islands in the face of sea level rise: some reflections from an international law perspective. *Anuario Español de Derecho Internacional*, 38, 452–454. <https://doi.org/10.15581/010.38.425-454>
- Holmes, A. R., & Rofo, S. (2016). *Global diplomacy : theories, types, and models*. Westview Press.
- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. PT Refika Aditama.
- IPCC. (2018). Impacts of 1.5°C Global Warming on Natural and Human Systems. Dalam *Global Warming of 1.5°C* (hlm. 175–312). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157940.005>
- IPCC. (2022). Framing and Contact. Dalam *Global Warming of 1.5°C* (hlm. 49–92). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157940.003>
- IPCC. (2024). *About the IPCC*. [ipcc.ch](https://www.ipcc.ch).
- Jett, J. (2021, November 9). *His country is sinking. So he's rolling up his pants to make the point at COP26*. NBC NEWS. Diambil 7 Maret 2025. <https://www.nbcnews.com/news/world/cop26-island-nations-risk-climate-change-struggle-make-point-rcna4912>
- Johnson, B., & Copage, M. (2023, November 16). *Australia's climate-security support for Tuvalu a leap in the right direction*. THE STRATEGIST. Diambil 14 April 2025. <https://www.aspistrategist.org.au/australias-climate-security-support-for-tuvalu-a-leap-in-the-right-direction/>
- Kgomosotho, K. G. (2020). INTERNATIONAL LAW RULES RELATING TO MIGRATION ARISING FROM RISING SEA-LEVELS. Dalam S. Motshweni, A. Chagopa, K. Thomas, M. van der Merwe, N. Herd, & P. Sekati (Ed.), *Pretoria Student Law Review* ((2020) 14 (2), hlm. 91–115). Pretoria University Law Press. <https://www.up.ac.za/pretoria-student-law-review-pslr>
- Kofe, S. (2022, November 15). *Rising Sea Levels Force Tuvalu to Move to the Metaverse: COP27 Speech* [Broadcast]. YouTube. Diambil 14 April 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=IXpeO5BgAOM>

- Kumar, L., Jayasinghe, S., Gopalakrishnan, T., & Nunn, P. D. (2020). Climate Change and the Pacific Islands. Dalam *Climate Change and Impacts in the Pacific* (hlm. 1–31). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32878-8_1
- Locci, E., & Jammoul, H. (2023). *Climate Diplomacy International and National Responses* (M. Costa, Penerj.; 1st Edition). Dar Abaad.
- Mabey, N., Gallagher, L., & Born, C. (2013). *Understanding Climate Diplomacy: Building diplomatic capacity and systems to avoid dangerous climate change*. E3G. Diambil 24 April 2025. www.e3g.org
- Mahbubani, K. (2022). Multilateral Diplomacy. Dalam *The Asian 21st Century* (hlm. 231–245). https://doi.org/10.1007/978-981-16-6811-1_43
- Malla, U. B. (2024). Climate Diplomacy: Implications and Prospects for Nepal. *NCWA Annual Journal*, 55(01), 28–36. <https://doi.org/10.3126/ncwaj.v55i01.62974>
- Martyr-Koller, R., Thomas, A., Schleussner, C. F., Nauels, A., & Lissner, T. (2021). Loss and damage implications of sea-level rise on Small Island Developing States. Dalam *Current Opinion in Environmental Sustainability* (Vol. 50, hlm. 245–259). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2021.05.001>
- Mathez, M. J. (2021). *Climate Justice for Tuvalu Awarding Compensation for Loss and Damages caused by Anthropogenic Climate Change*. Malmö University.
- McMichael, C., Farbotko, C., Piggott-McKellar, A., Powell, T., & Kitara, M. (2021). Rising seas, immobilities, and translocality in small island states: case studies from Fiji and Tuvalu. *Population and Environment*, 43(1), 82–107. <https://doi.org/10.1007/s11111-021-00378-6>
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third). SAGE Publications.
- Ministry of Justice, C. and F. A. T. G. (2023, April 25). *Tuvalu and Kosovo have recognized the important and mutually beneficial friendship*. Facebook.

https://web.facebook.com/permalink.php/?story_fbid=565477155769484&id=100069216129964&_rdc=1&_rdr#

- Morgan, W., Carter, S. G., & Manoa, F. (2024). Leading from the Frontline: A History of Pacific Climate Diplomacy. *The Journal of Pacific History*, 59(3), 353–374. <https://doi.org/10.1080/00223344.2024.2360093>
- Nakayama, M., Fujikura, R., Okuda, R., Fujii, M., Takashima, R., Murakawa, T., Sakai, E., & Iwama, H. (2022). Alternatives for the Marshall Islands to Cope with the Anticipated Sea Level Rise by Climate Change. *Journal of Disaster Research*, 17(3), 315–326. <https://doi.org/10.20965/jdr.2022.p0315>
- NASA Jet Propulsion Laboratory. (2023). *SWOT Measures Tuvalu Sea Level*.
- NASA Sea Level Change Team. (2023). *Assessment of Sea Level Rise and Associated Impacts for Tuvalu*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8069320>
- Olivia, R. (2022, November 11). *Sinking nation Tuvalu calls for treaty ending fossil fuel use at COP27*. World Economic Forum. Diambil 14 April 2025. <https://www.weforum.org/stories/2022/11/tuvalu-calls-for-treaty-ending-fossil-fuel-use-cop27/>
- Pannier, A. (2020). Bilateral Relations (W. Snow, Penerj.). Dalam T. Balzacq, F. Charillon, & F. Ramel (Ed.), *Global Diplomacy* (1 ed., hlm. 19–33). Palgrave Macmillan. https://doi.org/doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3_2
- Pasaribu, R. A., Ratna Suhita, N. P. A., Gumilar, G., Choiriyah, N., Siregar, R. R., & Yonatika, N. O. (2023). Sea level rise implication on small islands in Kepulauan Seribu, Jakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1251(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1251/1/012059>
- Pasifika Environews. (2021, November 4). *COP26: Tuvalu PM raises concerns on sea level rise affecting the island nation*. Pasifika Environews. Diambil 13 April 2025. <https://pasifika.news/2021/11/cop26-tuvalu-pm-raises-concerns-on-sea-level-rise-affecting-the-island-nation/>

- Sadai, S., Spector, R. A., DeConto, R., & Gomez, N. (2022). The Paris Agreement and Climate Justice: Inequitable Impacts of Sea Level Rise Associated With Temperature Targets. Dalam *Earth's Future* (Vol. 10, Nomor 12). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1029/2022EF002940>
- Saddington, L. (2023). The chronopolitics of climate change adaptation: land reclamation in Tuvalu. *Territory, Politics, Governance*. <https://doi.org/10.1080/21622671.2023.2216732>
- Salem, S. (2020). Climate Change and the Sinking Island States in the Pacific. *E-International Relations*, 3. Diambil 22 Oktober 2024. <https://www.e-ir.info/2020/01/09/climate-change-and-the-sinking-island-states-in-the-pacific/>
- Sancken, L. E. (2020). The Price of Sovereignty in the Era of Climate Change: The Role of Climate Finance in Guiding Adaptation Choices for Small Island Developing States. *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, 38(2). <https://doi.org/10.5070/15382050110>
- Sea Level Change Observations from Space. (t.t.). *Understanding Sea Level*. sealevel.nasa.gov. Diambil 17 November 2024, dari <https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/key-indicators/global-mean-sea-level>
- Sending, O. J., Øverland, I., & Hornburg, T. B. (2020). Climate Change and International Relations: A Five-Pronged Research Agenda. *Journal of International Affairs*, 73(1). Diambil 25 April 2025. <https://www.researchgate.net/publication/341103847>
- Tagata Pasifika. (2024, September 28). *Summit of Change at 79th United Nations General Assembly*. YouTube. Diambil 20 April 2025. https://youtu.be/PGb0Oyw4Gd4?si=IRBNCfETSGPK__lg
- The Government of Tuvalu, & The Government of Australia. (2023, November 9). *Treaty text Falepili Union*. DFAT Australian Government. Diambil 14 April

2025. <https://www.dfat.gov.au/geo/tuvalu/australia-tuvalu-falepili-union-treaty>

The Guardian. (2021, November 8). *Tuvalu minister to address Cop26 knee deep in water to highlight climate crisis and sea level rise*. Guardian staff and agencies. Diambil 13 April 2025. <https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/08/tuvalu-minister-to-address-cop26-knee-deep-in-seawater-to-highlight-climate-crisis>

the United Nations. (2021, November). *COP26: Together for our planet*. The United Nations. Diambil 13 April 2025. <https://www.un.org/en/climatechange/cop26>

The World Bank. (2024). *Data for Tuvalu, Kiribati, Marshall Islands*. Diambil 12 Oktober 2024. <https://data.worldbank.org/?locations=TV-KI-MH>

The World Bank Group. (2021). *Climate Risk Country Profile: Tuvalu*. Diambil 25 April 2025. www.worldbank.org

The World Bank Group. (2024). *The Pacific Atoll Countries Country Climate and Development Report*. Diambil 25 April 2025. www.worldbank.org

Tol, R. S. J., & Dvarskas, A. (2018). Economics of Sea Level Rise. Dalam *Encyclopedia of Ocean Sciences, Second Edition* (Vol. 1–5, hlm. V6-412-V6-415). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11643-4>

Tuvalu. (2020). *National Statement by Hon. Kausea Natano, Prime Minister of Tuvalu at the General Debate of the 75th Session of the United Nations General Assembly*. Diambil 13 April 2025. <https://gadebate.un.org/en/75/tuvalu>

Tuvalu. (2021a). *National Statement by Hon. Kausea Natano, Prime Minister of Tuvalu at the General Debate of the 76th Session of the United Nations General Assembly*. Diambil 13 April 2025. <https://gadebate.un.org/en/76/tuvalu>

Tuvalu. (2021b). *NATIONAL STATEMENT PRIME MINISTER OF TUVALU HON. KAUSEA NATANO UNFCCC (COP26)*. Diambil 13 April 2025. <https://unfccc.int/documents/309516>

Tuvalu. (2022a). *National Statement by Hon. Kausea Natano, Prime Minister of Tuvalu at the General Debate of the 77th Session of the United Nations General Assembly*. Diambil 13 April 2025. <https://gadebate.un.org/en/77/tuvalu>

Tuvalu. (2022b). *NATIONAL STATEMENT PRIME MINISTER OF TUVALU HON. KAUSEA NATANO UNFCCC (COP27)*.

Tuvalu. (2023a). *National Statement by Hon. Kausea Natano, Prime Minister of Tuvalu at the General Debate of the 78th Session of the United Nations General Assembly*. Diambil 13 April 2025. <https://gadebate.un.org/en/78/tuvalu>

Tuvalu. (2023b). *NATIONAL STATEMENT PRIME MINISTER OF TUVALU HON. KAUSEA NATANO UNFCCC (COP28)*.

Tuvalu. (2024a). *National Statement by Hon. Feleti Penitala Teo, Prime Minister of Tuvalu at the General Debate of the 79th Session of the United Nations General Assembly*. Diambil 13 April 2025. <https://gadebate.un.org/en/79/tuvalu>

Tuvalu. (2024b). *OPENING STATEMENT PRIME MINISTER OF TUVALU HON. FELEI PANITALA TEO UNFCCC (COP29)*.

UNFCCC. (2018). *About the secretariat*. unfccc.int.

United Nations. (2021, September 26). *Tuvalu - Prime Minister Addresses United Nations General Debate, 76th Session* [Broadcast]. YouTube. Diambil 13 April 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=ayvdrbg-4No>

United Nations. (2022, September 23). *the 77th UNGA Statement Prime Minister of Tuvalu, H.E. Kausea Natano*. the United Nations. Diambil 14 April 2025. <https://gadebate.un.org/en/77/tuvalu>

United Nations. (2023, September 22). *the 78th UNGA Statement Prime Minister of Tuvalu, H.E. Kausea Natano*. the United Nations. Diambil 14 April 2025. <https://gadebate.un.org/en/78/tuvalu>

United Nations. (2024, September 27). *the 79th UNGA Statement Prime Minister of Tuvalu, H.E. Feleti Teo*. the United Nations. Diambil 14 April 2025. <https://gadebate.un.org/en/79/tuvalu>

Yeo, S. (2024, November 21). Tuvalu: The disappearing island nation recreating itself in the metaverse. *BBC*. Diambil 20 April 2025. <https://www.bbc.com/future/article/20241121-tuvalu-the-pacific-islands-creating-a-digital-nation-in-the-metaverse-due-to-climate-change>